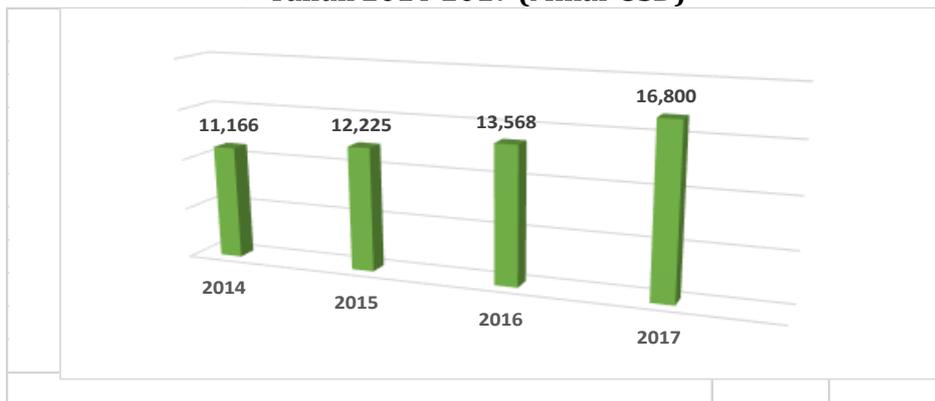


Fokus Pada Anggaran Promosi dan Pengembangan Pariwisata Yang Berkualitas Dalam RAPBN 2019 Sebagai Sumber Devisa

Dalam keadaan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD belakangan ini yang sempat menembus Rp14.800,00-Rp14.900,00, hal tersebut memaksa BI melakukan langkah stabilisasi dengan intervensi melalui Cadangan Devisa. Untuk menghadapi dinamika moneter, sebuah negara harus memiliki Cadangan Devisa yang besar agar nilai tukar mata uangnya terhadap USD stabil. Dalam kondisi perekonomian yang fluktuatif dan cukup sulit diprediksi seperti sekarang ini, RAPBN yang disusun pemerintah bersama DPR harus kredibel dan realistis untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi. Pemerintah harus fokus mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada sektor prioritas yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB), perolehan devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan DPR diharapkan dapat membahas, menyetujui dan melakukan kontrol pada RKA Kementerian/Lembaga sektor prioritas tersebut dengan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pariwisata. Data *balance of payment* (selisih ekspor-impor) sektor pariwisata yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dalam empat tahun terakhir menunjukkan surplus. Selain itu, kontribusi pariwisata terhadap devisa negara dari tahun 2014-2017 menunjukkan tren yang terus meningkat sebagai berikut :

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Devisa RI Tahun 2014-2017 (Miliar USD)



Sumber : Katadata (2018).

Secara peringkat, pendapatan devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2015 berada di urutan ke 4 sebagai penyumbang devisa terbesar pada 2015, di bawah migas, batu bara dan kelapa sawit. Kemudian pada tahun 2016, pariwisata berada di peringkat ke 2, dibawah sawit. Untuk menambah “pundi-pundi” devisa, tentunya pemerintah di Kemenpar harus fokus untuk mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Indonesia. Berdasarkan rilis dari BPS, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia meningkat selama 5 tahun terakhir. Jumlah kunjungan wisman selama 2017 merupakan yang tertinggi dalam periode tersebut. Selama 2017 jumlah kunjungan wisman mencapai 14,04 juta kunjungan atau naik 21,88 persen dibanding jumlah kunjungan selama 2016 yang tercatat 11,52 juta kunjungan. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2017 tersebut masih jauh dibawah target kinerja Kemenpar pada tahun 2017 sebesar 15 juta wisman.

Pemerintah sendiri pada tahun 2019 menargetkan kunjungan 20 juta wisman dan devisa sebesar Rp260 triliun. Namun, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja keras untuk memperbaiki daya saing. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand dari Indeks Daya Saing Pariwisata *World Economics Forum* (WEF) Tahun 2017 Indonesia berada di peringkat 42 dunia. Capaian tersebut masih tertinggal jauh dari Singapura (13), Malaysia

(26) dan Thailand (34). Aspek daya saing pariwisata yang harus mendapat perhatian untuk diperbaiki oleh pemerintah menurut WEF antara lain adalah : a) Keamanan, b) Higienitas, c) Implementasi Teknologi Informasi Komunikasi, d) Kelestarian lingkungan dan, e) infrastruktur untuk pelayanan kepada turis.

Dukungan kepada sektor pariwisata sebenarnya sudah cukup besar dalam bentuk alokasi anggaran yang terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Secara nominal sektor pariwisata mengalami pertumbuhan rata-rata 45,8 persen, yaitu dari Rp1,9 triliun dalam tahun 2014 menjadi Rp5,8 triliun dalam tahun 2017. Namun besaran anggaran yang terus meningkat tersebut tidak diikuti oleh efektivitas dalam menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan. BPK dalam LHP Pemeriksaan Kinerja Terhadap Atas Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2015-Semester I 2016 menemukan permasalahan ketidakefektifan khususnya di pemasaran dan pengembangan destinasi untuk segmen wisman sebagai berikut :

- a. Koordinasi Lintas Sektoral Pengembangan Destinasi Pariwisata belum memadai;
- b. Perencanaan pembangunan destinasi yang memperhatikan aspek-aspek pembangunan destinasi yang berkelanjutan masih belum memadai;
- c. Belum terdapat koordinasi antara strategi pemasaran dengan implementasi promosi terkait penggunaan media ruang;
- d. Target dan capaian *branding* melalui media ruang dan festival belum ditetapkan sehingga kinerja promosi melalui *branding* Pesona Indonesia maupun *Wonderful Indonesia* tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Meskipun besaran dana yang telah dialokasikan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai target kunjungan wisatawan, opsi pengurangan anggaran untuk pariwisata khususnya anggaran pemasaran wisatawan mancanegara bukanlah solusi yang tepat untuk saat ini. Simulasi regresi linier sederhana secara *time series* (2012-2016) oleh Sukirman (2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kenaikan anggaran pariwisata dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jika pemerintah menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara, maka dibutuhkan kurang lebih anggaran pemasaran pariwisata mancanegara sebesar Rp6,093,5 triliun. Meskipun terdapat pengaruh positif akan tetapi alokasi anggaran pemasaran pariwisata tersebut tidak efektif jika pemerintah belum melakukan perbaikan pada implementasi kebijakan koordinasi lintas sektoral antara K/L/Daerah untuk membangun destinasi pariwisata yang memadai dan koordinasi untuk memperbaiki strategi pemasaran. Jika promosi pariwisata tidak diimbangi dengan pengembangan destinasi pariwisata, yang memadai tentu akan membuat wisatawan kecewa, dan enggan untuk kembali ke Indonesia.

Berikut adalah pertimbangan kebijakan yang ditempuh oleh DPR dalam mendorong proses penganggaran yang kredibel di sektor pariwisata dalam rangka memperkuat devisa :

- a. DPR mendorong Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan alokasi anggaran khususnya pada pemasaran pariwisata mancanegara dan pengembangan destinasi dan industri pariwisata. Namun, tetap harus ada mekanisme *check and balance* antar keduanya agar hasilnya optimal. Untuk pemasaran sebaiknya fokus pada negara dengan potensi *spending* dan *length of stay* wisman yang tinggi;
- b. DPR mendorong Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk dapat mengalokasikan anggaran infrastruktur pariwisata lebih besar dan;
- c. Mendorong Koordinasi Lintas Sektoral untuk menyelesaikan “10 Bali Baru”.